STRATEGI DALAM MENGATASI MASALAH KETAHANAN PANGAN DAN KRISIS EKONOMI PADA MASA PANDEMI COVID-19

Vony Triana Putri Nur Sidik 220321100017

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar belakang

Di tengah bulan Maret, Indonesia lagi diramaikan oleh berita mengenai Crona virus, sebuah penyakit yang menular dipicu oleh virus corona baru. Sebelum wabahnya menyebar di china. wabah tersebut tidak pernah dikenal jauh hari. Virus tersebut amat sangat mengganggu semua aktivitas yang dikerjakan oleh seluruh individu. WFH (Work From Home) diwajibkan untuk mereka yang ingin bekerja, dan siswa sekolah serta mahasiswa disarankan untuk belajar di rumah. Akibat dari COVID-19, ekonomi di Indonesia, terutama di DIY, mengalami penurunan. Data BPS, dampak dari corona virus baru menyebabkan golongan tidak mampu meningkat menjadi Dua puluh enam koma empat puluh dua juta orang (Saputri and Rachmawatie, 2020).

Dalam konteks ketersediaan pangan, situasi wabah Corona virus yang mungkin memiliki potensi untuk menciptakan ketidakamanan bahan baku makanan. Ketidakamanan pangan merujuk pada kondisi di mana daerah, masyarakat, atau rumah tangga mengalami kekurangan pasokan pangan pada suatu waktu tertentu yang tidak mencukupi standar kebutuhan fisiologis untuk pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), Ketika suatu negara menghadapi keadaan darurat bahan baku makanan, itu terjadi saat suplai makanan yang tersedia belum mencukupi kebutuhan konsumsi karena bencana alam, isu lingkungan, atau masalah kemanusiaan, sehingga perlu bantuan makanan dari luar. Tanpa adanya bantuan tersebut, sebagian besar penduduk kemungkinan besar akan dihadapi dengan kekurangan gizi yang parah bahkan risiko kelaparan. Selama pandemi Corona virus baru, beberapa provinsi sepertinya akan mengalami kelangkaan pasokan

makanan karena jarak yang jauh dari sumber produksi atau terisolasi dari pusat produksi.(Sutawi, 2020).

Ketidakstabilan ekonomi dunia saat ini menyamai kejadian gangguan ekonomi pada tahun 1998 dan 2008, Namun, dengan adanya perbedaan dalam pemicu, keadaan untuk pendekatan penanganannya, setiap negara dihadapi pada perdebatan dan keuslitan tidak sama ketika menentukan kebijakan ekonomi untuk mengatasi permasalahan ini. Dalam situasi ini, APBN dalam bentuk yang samar terbebani Akibat terjadinya krisis kesehatan yang mengakibatkan banyak korban meninggal akibat virus tersebut, langkah-langkah harus diambil oleh pemerintah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Namun, tindakan ini tidak dapat dihindari memiliki dampak negatif terhadap kegiatan sosial dan ekonomi. Situasi ini berpengaruh terhadap peredaran ekonomi di dalam negeri dan mengganggu kestabilan ekonomi di seluruh dunia. Dalam konteks ini, peran pemerintah sangat berguna untuk memacu ekspansi ekonomi dan mempercepat pembangunan ekonomi, Upaya ini dilakukan terutama di negara-negara yang sedang mengalami pertumbuhan. Langkah-langkah tersebut melibatkan kebijakan moneter dan fiskal yang diterangkan oleh (Maharani and Marheni, 2022).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh corona virus ketahanan pangan dan ekonomi Indonesia?
2. Apa definisi ketahanan pangan dan krisis ekonomi?
3. Bagaimana strategi untuk mengatasi ketahanan pangan yang menurun dan krisis ekonomi akibat terjadinya penyebaran virus corona?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui dampak covid-19 terhadap ketahanan pangan dan ekonomi indonesia
2. Untuk mengetahui definisi dari ketahanan pangan dan krisis ekonomi
3. Untuk mengetahui strategi yang dapat mengatasi ketahanan pangan yang menurun dan krisis ekonomi akibat terjadinya penyebaran virus corona

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori

a. Teori strategi

Menurut (Mubarok, 2017) ada sejumlah ahli yang mengemukakan pengertian tentang strategi, dapat disampaikan sebagai berikut:

- Menurut pandangan Steiner dan Milner, strategi melibatkan langkah-langkah penting dalam mencapai tujuan organisasi. Ini meliputi menetapkan misi perusahaan, menentukan sasaran organisasi, memperkuat kekuatan internal dan eksternal, merumuskan kebijakan, dan mengimplementasikannya dengan cermat untuk mencapai tujuan utama organisasi.
- Menurut pendapat Hamdun Hanafi, strategi melibatkan proses membentuk visi masa depan yang menjadi pilar organisasi. Selain itu, strategi juga melibatkan pemilihan berbagai tindakan alternatif dan pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan guna mencapai tujuan tersebut.
- Menurut Johnson dan Scholes, strategi merujuk pada visi jangka panjang organisasi atau lembaga untuk meraih laba melalui pengaturan yang tepat dari potensi lingkungan yang penuh dengan tantangan. Strategi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan pasar dan tujuan khusus.

b. Teori ketahanan pangan

Menurut pendapat (Dwidjono H. Darwanto1, 2009) dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan tergantung pada ketersediaan beras dan tidak dapat dipisahkan darinya. Di Indonesia, beras dianggap sebagai sumber makanan utama bagi masyarakat. Ketahanan pangan dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana masyarakat di dalam tanah air, termasuk Indonesia, terhubung terjamin serta cukup terkait konsumsi bergizi dan berkualitas. Terdapat empat pilar utama dalam mencapai ketahanan pangan, yaitu: (1) ketersediaan makanan berkualitas dan bergizi yang cukup; (2) akses distribusi pangan yang merata bagi seluruh masyarakat; (3) pengoptimalan penggunaan sumber daya alam sesuai kebutuhan pangan; (4) stabilitas dan optimalisasi dari ketiga pilar sebelumnya.

c. Teori krisis ekonomi

Masalah ekonomi biasanya merujuk pada situasi di mana nilai tukar dalam negeri mengalami penurunan. dalam konteks ini yang dimaksud adalah dollar AS, dan ini disertai dengan peningkatan harga secara keseluruhan. Menurut penelitian oleh Kaminsky, Lizondo, dan Reinhart (KLR), gejala terjadinya krisis ekonomi meliputi kenaikan tingkat suku bunga, penurunan cadangan devisa, dan depresiasi mata uang yang signifikan

2.2 konsep pemikiran

Menurut (Nur, Nuraini and Herkulana, 2021), konsep ketahanan pangan melibatkan ketersediaan yang memadai. adanya makanan bukan juga bergantung pada pembuatan bahan makanan di satu tempat, serta terkait dengan impor dan ekspor neto melalui berbagai jalur. Namun, pada tingkat yang lebih rendah seperti tingkat Kabupaten, sulit untuk mengetahui aliran masuk dan keluar pangan serealia tersebut (Eka Ai-mas Pailis, 2010). Stabilitas harga pangan merupakan hal penting, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki kepentingan untuk menjaga harga pangan tetap konsisten. Biaya makanan bahwa konstan berkontribusi berdasarkan penyusunan keuangan akan sukses dan menciptakan kemapanan, strategi, dan kenyamanan. Masyarakat menginginkan tarif makanan serta merata karena fluktuasi dan tarif tinggi memberikan bahaya serta ketidakcocokan saat pengambilan kepastian (Rimadianti, Daryanto and Baliwati, 2016). Akses terhadap pangan-pangan utama juga penting dalam mencapai ketahanan pangan. Sebuah negara harus berusaha mencapai kemandirian pangan sebelum melakukan impor pangan, kecuali jika pengurus negeri yakin bahwa tarif makanan yang tersedia makanan di pasar sekarang amat sangat menakutkan atau mengecewakan. Pengadaan makanan dalam negeri akan berhasil ketika ada kesetimbangan antara penawaran dan permintaan makanan nasional, dengan harga dan ketersediaan yang bisa dijangkau oleh rakyat. Maka dari itu, harga dan ketersediaan makanan yang bisa diakses oleh rakyat berpengaruh pada ketahanan pangan (Salasa, 2021). Sasaran pokok dalam pertumbuhan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan pangan yang memadai, baik dari segi jumlah dan kualitasnya, yang aman, merata, serta terjangkau bagi semua keluarga. Permintaan makanan yang meningkat seiring pertumbuhan populasi mendorong pertumbuhan produksi pangan untuk mencapai stabilisasi harga dan ketersediaan makanan. Dengan demikian, ketahanan pangan sangat terkait dengan kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan makanan dan mendukung sektor pertanian (Pusvita, Sriati and Adriani, 2019).

Agar krisis ekonomi di masa mendatang dapat dicegah, dapat dilakukan dengan menerapkan konsep pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangan (Wihastuti, 2008), pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Peningkatan ini dicapai melalui perkembangan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan adaptasi ideologis terhadap berbagai situasi yang dihadapi. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu melakukan restrukturisasi iklim investasi dengan memperkenalkan norma-norma Islam dalam pola konsumsi, sehingga dapat membantu meningkatkan tingkat tabungan. Namun, mengubah tabungan menjadi modal bukanlah tujuan akhir yang diinginkan. Yang diperlukan adalah penggunaan modal tersebut dalam bentuk yang dapat mengarah pada penurunan kebutuhan dasar, ekspansi ekspor, serta peningkatan peluang berwirausaha dan penciptaan lapangan kerja. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan beberapa langkah, antara lain mengurangi tingkat konsumsi dan memperbaiki iklim investasi dengan melaksanakan langkah-langkah berikut: (1) menghilangkan hambatan-hambatan, (2) mengurangi ketidakpastian politik, (3) meninjau kembali tarif dan penggantian impor, (4) mengendalikan nilai tukar dan depresiasi mata uang, serta (5) mengontrol birokrasi (Mubyarto, Umer and Soleh, 2011).

Beberapa elemen akan memengaruhi perkembangan ekonomi, termasuk: potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan (resources that can be harnessed), potensi manusia (human potential), semangat wirausaha (entrepreneurial spirit), serta kemajuan teknologi (technological advancements) (Umi *et al.*, 2022).

2.3 variabel

a. covid 19

Wabah penyakit menular yang dikenal sebagai virus corona (COVID-19) sedang merebak dengan cepat, dan dampaknya telah menjangkau lebih dari 1 juta orang di berbagai negara di seluruh dunia. Awal mula penemuan virus corona ini terjadi di China pada bulan Desember 2019, ketika beberapa pasien mengunjungi rumah sakit di Wuhan dengan gejala penyakit yang tidak diketahui sebelumnya. Penelitian kemudian mengungkapkan bahwa virus tersebut adalah varian baru yang sebelumnya dikenal sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2). Pada tanggal 11 Maret, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan status pandemi untuk penyebaran virus corona dengan sebutan COVID-19, mengingat tingkat penyebaran dan keparahan wabah yang mengkhawatirkan. Sebagai respons terhadap pernyataan tersebut, sejumlah negara, termasuk Indonesia, mengumumkan status

kedaruratan kesehatan masyarakat guna mengatasi wabah corona virus (COVID-19).

Penanganan pandemi COVID-19 telah menghadirkan tantangan yang rumit di berbagai bidang yang saling terkait, seperti sektor kesehatan, ekonomi, politik, sosial budaya, dan keamanan nasional. Saat ini, fokus utama dalam pandemi COVID-19 terletak pada kesehatan dan ekonomi. Kedua aspek ini memerlukan perhatian serius dan menjadi perhatian utama bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah dihadapkan pada dilema yang sulit, yakni membatasi penyebaran penyakit atau menghindari krisis ekonomi yang berpotensi mengakibatkan kelangkaan pangan dan menderita bagi mereka yang berada dalam kondisi kekurangan serta kelaparan di dunia (Dewi Wulandani and Anggraini, 2020).

b. ketahanan pangan

Ketika corona virus tersebar dengan sangat luas, isu mengenai ketahanan pangan telah menjadi topik yang hangat dibicarakan dalam masyarakat dan kalangan akademik. Situasi pandemi ini telah mengakibatkan perubahan signifikan dalam sistem dan pola kerja sektor pangan, mulai dari tahap produksi hingga konsumsi. Petani dan produsen makanan menghadapi tantangan dalam hal pasokan bahan baku dan mereka harus menyesuaikan protokol produksi untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan di tengah pandemi COVID-19, terutama di daerah yang terkontaminasi. Keberlanjutan pasokan pangan menjadi hal yang penting, mengingat bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang fundamental selain pakaian dan tempat tinggal. Masalah utama yang muncul adalah distribusi pangan yang terhambat akibat pembatasan yang diberlakukan. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan persediaan pangan di berbagai wilayah (Wirata, 2022). Pemerintah secara resmi mengadopsi konsep ketahanan pangan untuk menjaga kebutuhan pangan penduduk dan sektor pertanian secara keseluruhan (Syahyuti *et al.*, 2016).

c. Krisis ekonomi

Menurut (Hilman, 2017), terjadi krisis ekonomi saat nilai mata uang domestik mengalami penurunan yang diikuti oleh kenaikan harga di pasar. Beberapa ahli berpendapat bahwa adanya beberapa faktor utama yang menjadi penyebab krisis ekonomi, salah satunya adalah pandangan yang diajukan oleh Zulhelmy. Dia mengidentifikasi atau mengungkapkan empat faktor utama yang menjadi penyebab krisis tersebut. Pertama, perubahan sistem moneter setelah Perjanjian Bretton Woods, di mana emas digantikan oleh dolar Amerika sebagai cadangan mata uang, telah menyebabkan dominasi ekonomi global oleh dolar

Amerika. Hal ini mengakibatkan setiap guncangan ekonomi yang terjadi di Amerika memiliki dampak besar bagi perekonomian negara-negara lain. Kedua, hutang yang dikenakan bunga juga menjadi masalah ekonomi yang signifikan, karena jumlah pokok hutang akan terus bertambah sesuai dengan persentase bunga yang dikenakan. Hal ini menyebabkan krisis pembayaran hutang dan pelambatan aktivitas ekonomi, terutama di kalangan kelas menengah dan atas yang tidak mampu membayar hutang dan melanjutkan produksi. Ketiga, sistem perdagangan di bursa dan pasar modal, seperti perdagangan saham, obligasi, dan komoditas tanpa adanya pengiriman fisik komoditas terkait, cenderung menimbulkan masalah daripada memecahkannya. Transaksi yang dilakukan berkali-kali tanpa adanya pengalihan kepemilikan komoditas dari pemilik aslinya menciptakan spekulasi dan ketidakstabilan di pasar. Keempat, masalah kepemilikan yang tidak jelas juga menjadi faktor penting. Pandangan tentang kepemilikan dalam pemikiran Timur dan Barat berbeda, yaitu kepemilikan umum yang dikendalikan oleh negara dan kepemilikan pribadi yang dikuasai oleh kelompok tertentu. Ketidaktahuan tentang status kepemilikan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dan masalah ekonomi. Secara keseluruhan, emas yang tidak lagi digunakan sebagai cadangan mata uang, hutang ribawi, sistem perdagangan bursa yang kurang sempurna, dan ketidakjelasan kepemilikan adalah beberapa faktor utama yang diidentifikasi oleh Zulhelmy sebagai penyebab krisis ekonomi.

2.4 hasil penelitian terdahulu

Berdasarkan penelitian sebelumnya, beberapa temuan telah dihasilkan. Dalam penelitian yang disusun oleh (Hirawan and Verselita, 2020), langkah-langkah antisipatif harus diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi dampak penyebaran viris corona dalam mengenai kelangkaan dan kestabilan harga pangan. Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua fasilitas serta bantuan terkait sektor pangan berjalan dengan lancar, mulai dari tahap produksi hingga konsumsi. Salah satu faktor kunci dalam menjalankan kebijakan pangan ini adalah adanya koordinasi yang efektif antara Kementerian dan Lembaga Negara (K/L). Sebelumnya, bisa diperkirakan bahwa perdagangan komoditas pangan akan dibatasi dan logistik akan mengalami gangguan. Demikianlah sebabnya, pemerintah harus mengoptimalkan produksi makanan di dalam negara dan meningkatkan infrastruktur logistik makanan di tingkat nasional.

Dalam penelitian lain terkait masalah ini, dengan tujuan menganalisis dan memahami ketahanan pangan pada masyarakat adat pada waktu pandemi virus

corona, serta implikasi hukum terkait ketahanan pangan pada masyarakat adat yang belum terpenuhi selama masa virus corona menyerang. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam masa pandemi silam, ketahanan pangan di kalangan masyarakat adat sangat terpengaruh. Situasinya khususnya memprihatinkan karena tanah dan wilayah yang menjadi hak masyarakat adat telah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam mereka secara berlebihan. Dampak ini akan memperparah upaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat adat. Intinya, prinsip utamanya adalah bahwa negara atau perusahaan multinasional tidak boleh mengubah atau mengambil alih hak masyarakat adat terkait ketahanan pangan dan kedaulatan atas tanah mereka. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memastikan pemenuhan hak pangan, seperti yang ditetapkan dalam peraturan hukum internasional dan domestik. Diperlukan upaya untuk mengatasi berbagai situasi dan kondisi yang menghalangi pelaksanaan tanggung jawab negara. Jika negara tidak segera mengambil tanggung jawab terhadap hak-hak mendasar seperti hak atas pangan, maka negara dapat dianggap melanggar hukum internasional dan berpotensi menghadapi tuntutan hukum (Wattimena and Hattu, 2021).

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh sekelompok peneliti pertama-tama menyoroti peran berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Badung bersama masyarakat berupaya meningkatkan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Agar tujuan tersebut tercapai, dilakukan studi mengenai cara-cara bercocok tanam makanan, membentuk kemitraan antara penghasil makanan di Kabupaten Badung, memperjuangkan peraturan yang mendukung, memberikan bantuan finansial, dan memperkuat komunitas. Namun, usaha mereka terkendala oleh dampak pandemi COVID-19 (Wirata, 2022). Upaya untuk meningkatkan keberlanjutan pangan selama masa pandemi di Kabupaten Badung dilakukan melalui penguatan kearifan lokal. Melestarikan pertanian padi sawah merupakan salah satu tindakannya, dengan mengadopsi sistem subak sebagai aset sosial untuk meningkatkan keberlanjutan produksi pangan dan menggambarkan peran desa adat dalam hal ini. Keberlanjutan pangan akan terancam tanpa adanya sistem subak, tetapi jika sistem subak tetap terjaga, akan berfungsi sebagai penopang keberlanjutan pangan di Kabupaten Badung. Di masa depan, penting untuk melakukan penelitian mengenai penguatan sistem subak sebagai strategi untuk memperkuat ketahanan pangan, bukan hanya di Kabupaten Badung, namun juga di beberapa daerah yang lain.

Artikel yang ditulis oleh(Adiyanta, 2020), bertujuan untuk Memeriksa pengalaman Indonesia dalam menghadapi dan mengatasi krisis keuangan dengan menerapkan kebijakan fiskal yang efektif dan melakukan reformasi

perpajakan nasional melalui perbaikan regulasi dan administrasi perpajakan yang terbaru dan tidak ketinggalan zaman, memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah dalam mengembangkan Kebijakan yang diadopsi adalah untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak ekonomi dan moneternya yang diakibatkan oleh adanya penyebaran virus corona. Dalam praktek perpajakan nasional, pendekatan sosiolegal digunakan untuk menjelaskan bagaimana pajak digunakan sebagai alat kebijakan fiskal dengan tingkat kecermatan yang tinggi. Temuan penelitian ini menunjukkan beberapa hal sebagai berikut: a) Pajak berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang menggabungkan fungsi pengaturan dan stabilisasi ekonomi, yang digunakan untuk menjaga kondisi ekonomi nasional agar tetap stabil dan berkelanjutan. Pajak juga memiliki peran penting dalam menciptakan pendapatan negara yang berkelanjutan. Selain itu, pajak juga membantu dalam mengalokasikan anggaran belanja negara dengan seimbang, memperhatikan biaya pemerintah dan kepentingan umum, serta memastikan distribusi yang adil untuk kesejahteraan masyarakat. Semua faktor ini berkontribusi pada stabilitas pertumbuhan ekonomi yang mendukung pembangunan nasional. Keberhasilan dalam hal ini sangat bergantung pada faktor-faktor tersebut.

BAB III

PENDEKATAN

Dalam tulisan opini ini, digunakan metode penulisan yang berfokus pada pendekatan studi pustaka dengan tujuan memperhatikan dan menganalisis semua data yang terkait dengan subjek eksplorasi. Pendekatan studi pustaka merupakan jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi dan data secara komprehensif dari berbagai sumber literatur, seperti jurnal, buku, makalah, majalah, catatan, artikel, atau sumber referensi lainnya. Pendekatan ini juga mencakup tinjauan terhadap penemuan-penemuan studi terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas.

Krisis ekonomi dan ketahanan pangan yang rendah merupakan hal yang terjadi karena adanya penyebaran virus corona yang melanda indonesia pada 2020 silam. Dari dampak tersebut akan diteliti bagaimana cara menghadapi ketahanan pangan dan kesiapan krisis pasca masa pandemi covid-19. Dalam menulis esay ini ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu pertama menentukan tema yang mana dampak covid 19 yang akan dijadikan tema kemudian dicari strategi menghadapi masalah tersebut dengan memanfaatkan informasi dan data yang bersumber dari artikel dan penelitian terdahulu lalu dari informasi tersebut dianalisis dan di gabungkan dengan tema yang sudah ada secara baik sesuai dengan sistematika sehingga dapat dimanfaatkan oleh pembaca.

BAB IV

PEMBAHASAN

Ketahanan pangan, menurut definisi yang disetujui oleh Komite Keamanan Pangan Dunia (CFS) sebagai badan tertinggi yang mengawasi tata kelola ketahanan pangan global, mengacu pada keadaan di mana setiap individu memiliki kemampuan fisik dan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka secara memadai. Ini mencakup akses terhadap makanan yang aman dan bergizi, sesuai dengan preferensi diet mereka, dengan tujuan menjaga kesehatan dan keaktifan mereka. Secara sederhana, ketahanan pangan bisa diartikan sebagai situasi di mana semua orang memiliki akses yang cukup baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi, dengan tujuan memenuhi kebutuhan pangan dan preferensi diet mereka untuk menjalani kehidupan yang aktif dan sehat (Ramadhan *et al.*, 2021).

Di Indonesia, adanya pandemi COVID-19 cukup membuat kekhawatiran dengan pasokan makanan. Pada bulan Mei 2020, Menteri Pertanian mengungkapkan bahwa persediaan beras diperkirakan akan mencapai empat belas juta ton berkisar pada bulan April dan Juni. Jumlah ini melebihi perkiraan konsumsi masyarakat yang sudah mencapai tujuh koma enam juta ton beras selama 3 bulan. Dengan demikian, pada bulan Juni 2020, Indonesia diharapkan memiliki surplus beras sebesar 6,4 juta ton. Namun, melihat perkiraan stok dan produksi pada paruh kedua tahun 2020, pemerintah perlu menentukan jumlah impor beras yang diperlukan untuk memenuhi permintaan di dalam negeri. Indonesia sering menghadapi tantangan dalam menjaga ketersediaan beras pada kisaran bulan November dan bulan Januari karena periode tersebut termasuk ke dalam musim paceklik (Arif *et al.*, 2020).

Dalam rangka menghentikan penyebar luasan kasus yang positif covid, Pemerintah indonesia menerapkan aturan baru yang dikenal dengan sebutan WFH yang merupakan singkatan dari Work From Home yang berarti bekerja dari rumah. Akibat dari kebijakan WFH ini, sebagian besar penduduk menghabiskan waktu dirumah saja. Tetapi situasi ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat perkotaan untuk melakukan urban farming. Dengan memaksimalkan adanya lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian seperti bercocok tanam, akses pangan akan terjamin karena adanya dukungan dari masyarakat kualitas pada lingkungan hidup akan terjaga (Sinaga, Kurniawan and Kusumawati, 2022).

Dengan adanya permasalahan terhadap ketahanan pangan akibat adanya covid-19 diperlukan strategi salah satunya adalah meningkatkan ketersediaan

pangan di Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan penduduk sesuai dengan anjuran konsumsi dan mempersiapkan kondisi di masa depan. Strategi ini juga diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan peristiwa di masa depan. Strategi yang dapat dilakukan yaitu Grand strategi, lokalisasi wilayah potensi dan juga analisis SWOT yang tersusun merupakan konsep dari grand strategi. Strategi analisis SWOT terbagi menjadi 3 yaitu jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang. Rencana jangka pendek mencakup memberikan dorongan dan sumber daya yang memadai dalam sektor pangan dan pertanian, meningkatkan pendidikan dan persiapan bagi petani dan penduduk yang kurang mampu, serta meningkatkan minat dalam membeli produk lokal. Di sisi lain, strategi besar yang didasarkan pada lokalitas wilayah memberikan ikhtisar tentang daerah-daerah yang memiliki potensi sebagai pusat produksi pangan, daerah yang dapat mencapai tingkat kemandirian pangan, dan daerah yang rentan terhadap masalah pangan. Sedangkan rencana jangka panjang adalah mengembangkan beragam jenis pangan dan komoditas pertanian untuk masyarakat setempat dan nasional. Cara ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah jangka menengah seperti meningkatkan persaingan komoditas dengan memperbaiki kualitas dan standar pangan dan produk pertanian, menjaga kelestarian sistem sungai, merangsang inovasi dan kreativitas dalam teknologi dan pengolahan makanan, pertanian, dan peternakan, serta menciptakan lebih banyak peluang kerja di sektor pertanian. (Wulandari and Sholihin, 2020).

Dalam permasalahan ini tugas penyuluh pertanian juga dibutuhkan. Namun, dalam situasi pembatasan sosial yang meluas, penyuluh pertanian memiliki akses yang cukup terbatas untuk menjalankan tugas dan perannya sebagai pendorong, fasilitator, dan pendukung program pemerintah menjadi terbatas. Meskipun demikian, upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan dari tingkat nasional hingga individu masih hal utama yang harus dilaksanakan. Diharapkan bahwa adanya media online dapat menjadi platform bagi para pembuat kebijakan, penyuluh pertanian, dan petani untuk mencari informasi yang terhubung langsung dengan semua kegiatan di sektor pertanian guna mendukung dan memperkuat ketahanan yang terjadi pada waktu pandemi. (Sudarmansyah *et al.*, 2021).

untuk berhasil menerapkan strategi kebijakan pangan, pemerintah sangat berperan penting, peran pemerintah dapat dilihat dari tugas dinas pangan. Dimana dinas pangan harus memperhatikan dengan seksama bahwa fasilitas, infrastruktur, dan memberikan bantuan di segala aspek pangan, dari awal produksi sampai konsumsi agar berfungsi secara optimal. Pentingnya koordinasi antara Dinas Pangan dengan instansi/OPD lainnya menjadi faktor utama dalam

mencapai kesuksesan dalam menerapkan strategi kebijakan pangan (Masniadi *et al.*, 2020).

sedangkan, strategi untuk menghadapi krisis ekonomi dapat dilakukan dengan mencapai pertumbuhan ekonomi secara optimal. Agar pertumbuhan ekonomi tercapai dengan lebih baik,maka diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan manajemen pembangunan dan pemerintahan, melakukan reformasi pada sistem pengambilan keputusan, dan membentuk program pengembangan kelembagaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Selain itu, penting juga untuk mengatasi praktik monopoli dan dominasi bisnis yang terintegrasi dari awal hingga akhir, serta menghadapi praktik lain yang merugikan masyarakat, terutama praktik monopoli yang memungkinkan perusahaan untuk secara bebas menentukan volume produksi rendah demi mendapatkan harga penjualan yang lebih tinggi (Herlina, 2020).

Menurut (Fadhilah, 2020), untuk mencapai ekonomi yang optimal diperlukan peran pemerintah. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk memperkokoh ekonomi rakyatnya dengan memastikan keadilan distribusi yang ada. Untuk itu, baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia lebih baik untuk menerapkan pendekatan distribusi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal tersebut, dilakukan sebagai implementasi untuk mengatasi dampak dari terjadinya krisis ekonomi yang disebabkan oleh adanya pandemi. Dalam sistem ekonomi Islam, peran dari pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mencapai keadilan distribusi, sebab penciptaan ketentraman dianggap sebagai tanggung jawab umat sebagai khalifah Allah SWT di dunia ini.

Selanjutnya, pemerintah juga memberikan solusi bagi masyarakat yang terkena krisis ekonomi dimana solusi yang diberikan oleh pemerintah adalah memberikan bantuan langsung tunai yang bisa disingkat BLT untuk masyarakat tidak mampu yang sangat membutuhkan, dengan tujuan untuk mengurangi beban mereka yang terdampak Covid-19. Dana tersebut disediakan oleh pemerintah dan digunakan untuk membantu meringankan kebutuhan mereka (Student *et al.*, 2021).

Aturan pembaruan perpajakan Indonesia yang telah disusun secara optimal oleh pemerintah bisa secara efektif mendukung perekonomian nasional, dimana hal tersebut dapat memperkuat kesiapan krisis ekonomi melalui perubahan peraturan juga administrasi perpajakan yang terbaru. Dengan kebijakan praktis perpajakan yang mengintegrasikan fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal, diharapkan dapat menjadi pengalaman berharga dalam pembuatan kebijakan oleh Pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam mengantisipasi

potensi krisis ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 (Aqmarina and Furqon, 2020).

ACT, organisasi filantropi Islam, menggunakan berbagai strategi untuk mengatasi terjadinya krisis ekonomi dan kemiskinan, terutama dengan pengoptimalan konsep ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf). Konsep ini mewajibkan untuk mampu menghadapi tantangan dan memainkan peran yang lebih signifikan di dalam menjaga Indonesia, negara dengan sebagian besar penduduknya yang merupakan Muslim, dengan meminimalkan dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan ACT untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19 yaitu program wakaf usaha mikro, khususnya wakaf modal usaha mikro (WMUM) atau wakaf modal usaha mikro. Melalui program WMUM, dapat membantu sebagian masyarakat dari segi ekonomi yang terjadi karena dampak dari pandemi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan sehari-hari. Tujuan diadakannya program tersebut yaitu diharapkan meningkatkan kesejahteraan ekonomi pada masyarakat yang terkena dampak dan meringankan krisis ekonomi saat ini. Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa upaya tersebut melampaui amal, karena mempromosikan filantropi dalam komunitas juga membutuhkan kecakapan dalam berbagai instrument (Janah, 2021).

BAB V

KESIMPULAN

Masuknya virus covid-19 ke indonesia memberikan dampak yang merugikan di banyak sektor, terutama sektor pertanian. Ketahanan pangan yang tidak optimal, krisis ekonomi, dan kemiskinan merupakan beberapa contoh dampak buruk dari terjadinya virus corona yang melanda. Namun, masalah tersebut dapat diatasi dengan beberapa strategi. Dilihat dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan antara lain grand strategi yang disusun dari hasil analisis SWOT dan lokalisasi wilayah potensi. Strategi ini terbagi menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang. Strategi selanjutnya yaitu menggunakan peran dari penyuluh pertanian dimana sebagai pendorong, fasilitator, dan pendukung mereka dapat menyuluhkan tentang media online sebagai platform petani untuk menemukan berbagai informasi mengenai berbagai kegiatan di sektor pertanian guna memperkuat ketahanan pangan di tengah maraknya penyebaran virus corona. Pemerintah juga berperan melalui dinas yang terkait seperti dinas pangan, dinas pangan harus memperhatikan dengan seksama bahwa fasilitas, infrastruktur, dan mengadakan bantuan di segala aspek pangan mulai awal sampai akhir.

Sedangkan itu, dalam menghadapi krisis ekonomi selama pandemi, upaya untuk mengatasi situasi tersebut meliputi peningkatan aktivitas ekonomi oleh pemerintah dan pemberian solusi kepada masyarakat yang terdampak. Salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah adalah melalui bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat tidak mampu yang membutuhkan, dengan tujuan untuk mengurangi beban mereka yang karena dampaknya virus corona. Selain itu, ACT, sebuah lembaga kebaikan Islam, menerapkan beragam strategi untuk menghadapi krisis ekonomi dan kemiskinan, terutama melalui pemanfaatan maksimal ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf). Harapannya adalah bahwa ZISWAF dapat menjadi solusi yang efektif dan memiliki peran krusial dalam menjaga Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan mengurangi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyanta, F.S. (2020) ‘Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19’, *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), pp. 162–181. Available at: https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.162-181.

Aqmarina, F. and Furqon, I.K. (2020) ‘Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19’, *Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 03(02), pp. 256–274. Available at: www.febi.metrouniv.ac.id;

Arif, S. *et al.* (2020) *Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019-2020, The SMERU Research Institute*.

Dewi Wulandani, B.R. and Anggraini, W. (2020) ‘Food Estate Sebagai Ketahanan Pangan Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Desa Wanasaba’, *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(1), p. 386. Available at: https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i1.3062.

Dwidjono H. Darwanto1 (2009) ‘Ketahanan Pangan berbasis Ketersediaan Produk dari Petani Subsisten’, *Ilmu Pertanian*, 12(2), pp. 152–164.

Eka Ai-mas Pailis (2010) ‘Ketersediaan Pangan di Kabupaten Rokan Hulu’, *Jurnal Ekonomi*, 18(2), pp. 133–141.

Fadhilah, N. (2020) ‘Strategi Manajemen Distribusi Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19’, *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(4), pp. 242–251. Available at: https://doi.org/10.35899/biej.v2i4.168.

Herlina, H. (2020) ‘Perubahan Fluktuatif Struktur Ekonomi Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19’, *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 17(2), pp. 199–210. Available at: https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v17i2.142.

Hilman, R.S. (2017) ‘Ekonomi Islam Sebagai Solusi Krisis Ekonomi’, *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), p. 117. Available at: https://doi.org/10.22219/jes.v2i2.5100.

Hirawan, F.B. and Verselita, A.A. (2020) ‘Kebijakan Pangan di Masa Pandemi Covid-19’, *Csis Commentaries*, april(CSIS Commentaries DMRU-048-ID), pp. 1–7.

Janah, W. (2021) ‘Optimalisasi Peran Filantropi Islam Aksi Cepat Tanggap dalam Upaya Mengatasi Krisis Ekonomi di Era Pandemi Covid-19’, *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1(2), pp. 65–80. Available at:

https://doi.org/10.21154/joipad.v1i2.3574.

Maharani, Y. and Marheni (2022) ‘Strategi Kebijakan dalam Mengatasi Krisis Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 : (Studi Kasus Indonesia)’, 4(1), pp. 34–38.

Masniadi, R. *et al.* (2020) ‘Telaah Kritis Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19’, *Indonesian Journal of Social Science and Humanities* , 1(2), pp. 109–120.

Mubarok, N. (2017) ‘Strategi pemasaran islami dalam meningkatkan penjualan pada Butik Calista’, *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 3(1), pp. 73–92. Available at: http://www.pekerjadata.com/2013/11/.html.

Mubyarto, P., Umer, D.A.N. and Soleh, A. (2011) ‘Konsentrasi perbankan syariah program studi muamalat fakultas syariah dan hukum uin syarif hidayatullah’.

Nur, S., Nuraini, A. and Herkulana, H. (2021) ‘Resistensi Ekonomi dan Ketahanan Pangan Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Krisis Keuangan Di Masa Pandemi Covid 19 Kecamatan Sejangkung’, *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 10(11), p. 10.

Pusvita, E., Sriati, S. and Adriani, D. (2019) ‘Analisis Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Beras Di Kabupaten Ogan Komering Ulu’, *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 15(2), p. 97. Available at: https://doi.org/10.20961/sepa.v15i2.27862.

Ramadhan, A. *et al.* (2021) ‘Analisis strategi dan klasterisasi ketahanan pangan nasional dalam menghadapi pandemi covid-19’, *Teknologi Pangan : Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah Teknologi Pertanian*, 12(1), pp. 110–122. Available at: https://doi.org/10.35891/tp.v12i1.2179.

Rimadianti, D.M., Daryanto, A. and Baliwati, Y.F. (2016) ‘Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan’, *Jurnal Gizi dan Pangan*, 11(1), pp. 75–82.

Salasa, A.R. (2021) ‘Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia’, *Jejaring Administrasi Publik*, 13(1), pp. 35–48. Available at: https://doi.org/10.20473/jap.v13i1.29357.

Saputri, S.A.D.S. and Rachmawatie, D. (2020) ‘Budidaya Ikan Dalam Ember : Strategi Keluarga Dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Pangan Di Tengah Pandemi Covid-19’, *Jurnal Ilmu Pertanian Tirtayasa*, 2(1), pp. 102–109.

Sinaga, G.A.D., Kurniawan, Y. and Kusumawati, A. (2022) ‘Urgensi Komunitas, Budaya Lokal Dan Ketahanan Pangan Dalam Gerakan Urban

Farming Di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(2), pp. 337–351. Available at: https://doi.org/10.23887/jish.v11i2.45041.

Student, M.T. *et al.* (2021) 'Krisis Ekonomi Bangsa Indonesia dimasa Pandemi Covid-19', *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), pp. 1–13.

Sudarmansyah, S. *et al.* (2021) 'Peran Penyuluh Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Pada Saat Wabah Pandemi Covid-19', *Jurnal AGRIBIS*, 14(1). Available at: https://doi.org/10.36085/agribis.v14i1.1265.

Sutawi (2020) 'Food Estate: Mewujudkan Ketahanan Pangan Masa Pandemi dan Pasca Pandemi Covid-19', *New Normal, Kajian Multidisiplin*, p. 583. Available at: https://workpointnews.com/2020/05/06/new-normal-covid19-newworld/.

Syahyuti, N. *et al.* (2016) 'Kedaulatan Pangan sebagai Basis untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional', *Forum penelitian Agro Ekonomi*, 33(2), p. 95. Available at: https://doi.org/10.21082/fae.v33n2.2015.95-109.

Umi, N.T. *et al.* (2022) 'Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Tingkat Pertumbuhan di Indonesia Dalam Pandangan Islam', 3(2), pp. 101–109.

Wattimena, J.A.Y. and Hattu, V.V. (2021) 'Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan Ham Dalam Masa Pandemi Covid-19', *Sasi*, 27(2), p. 247. Available at: https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.448.

Wihastuti, L. (2008) 'PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA: Determinan dan Prospeknya', *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), p. 30660.

Wirata, G. (2022) 'Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi COVID-19 melalui Penguatan Kearifan Lokal Di Kabupaten Badung Bali', *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 12(1), p. 69. Available at: https://doi.org/10.24843/jkb.2022.v12.i01.p04.

Wulandari, N. and Sholihin, H. (2020) 'STRATEGI MENGHADAPI KETAHANAN PANGAN (Dilihat Dari Kebutuhan Dan Ketersediaan Pangan) PENDUDUK INDONESIA DI MASA MENDATANG (Tahun 2015 – 2040)', *PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING*, 1(2), pp. 274–282.